

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
(TPAK) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Nama : Yesinta Valentina

NIM : 18313313

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2024

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
(TPAK) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Yesinta Valentina

NIM : 18313313

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FBE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Desember 2024

Penulis,



Yesinta Valentina

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Dan Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Wilayah
Provinsi Jawa Timur

Nama : Yesinta Valentina

NIM : 18313313

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 11 Desember 2024

telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suharto', is shown within a light gray rectangular box.

Suharto, SE., M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Disusun oleh : YESINTA VALENTINA

Nomor Mahasiswa : 18313313

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Jum'at, 14 Februari 2025

Penguji/Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Prof. Agus Widarjono, SE., MA.,Ph.D

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.

MOTTO

*Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya
kemudahan dalam urusannya
(QS. Ath-Thalaq 65:4)*

*Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi?
(Yesinta Valentina)*

*Keluarlah dari zona nyaman
(Alya Aqilah)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillahirobbil ‘alamin penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan kekuatan yang diberikan selama proses menyelesaikan skripsi. Selesaiannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta akan mempersembahkan karya yang sederhana ini kepada:

1. Allah SWT yang telah mempermudah dalam segala urusan.
2. Bapak yang selalu memberikan pelajaran akan menghargai waktu dan disiplin akan segala hal serta belajar bertanggung jawab akan kehidupan baik dunia maupun akhirat.
3. Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh dalam segala aspek hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Diri saya sendiri, Yesinta Valentina yang mau melawan rasa malas yang besar dan selalu yakin atas kemampuan yang dimiliki bahwa semua bisa teratasi jika ada kemauan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada umatnya. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada bimbingan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan hidayahnya kepada umat manusia. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Provinsi Jawa Timur”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis berharap bahwa dengan adanya skripsi ini masih dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada pembaca. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu baik dalam bentuk dukungan dan do’a agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Maka dari itu, ucapan terimakasih yang sebesar-sebsarnya akan ditujukan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kemudahan dalam segala urusan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Bapak dan Ibu tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, do’a, dan dukungan dalam segala aspek.
3. Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
4. I’m Bapak Drs. Agus Widarjono, Prof., SE., MA., Ph.D selaku ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Sahabudin Sidiq, MA., Ph.D selaku ketua program studi S1 Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Suharto SE., M.Si selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bimbingan dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Seluruh dosen dan para karyawan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
8. Seluruh teman Ilmu Ekonomi 2018 yang tidak bisa ditulis satu persatu karena sudah menemani selama perkuliahan.
9. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, dengan penuh kesadaran penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Tanpa bantuan dari semua pihak maka skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini diberikan balasan yang berlipat ganda dan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 17 Desember 2024

Penulis



Yesinta Valentina

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN UJIAN	iv
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	14
2.1 Kajian Pustaka.....	14
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Kemiskinan	15
2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.2.3 Ketimpangan Pendapatan.....	19
2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	21
2.3 Hubungan Antar Variabel.....	22
2.3.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	22
2.3.2 Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan	22

2.3.3 Hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan	23
2.4 Kerangka Penelitian	24
2.5 Hipotesis.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Objek dan Subjek Penelitian	25
3.2.1 Objek Penelitian	25
3.2.2 Subjek Penelitian.....	26
3.3 Variabel Penelitian	26
3.3.1 Variabel Bebas.....	26
3.3.2 Variabel Terikat	27
3.4 Definisi Operasional	27
3.5 Metode Pendekatan Penelitian	29
3.6 Metode Pengumpulan Data	29
3.7 Metode Analisis Data	30
3.7.1 Regresi Data Panel	30
3.7.2 Uji Hipotesis	30
BAB IV	32
HASIL PENELITIAN.....	32
4.1 Pemilihan Model Regresi.....	32
4.1.1 Uji Chow	32
4.1.2 Uji Hausman	34
4.2 Hasil Regresi dengan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	37
4.3 Analisis Deskriptif.....	38
4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	39
4.3.2 Ketimpangan Pendapatan.....	39
4.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	39
4.3.4 Tingkat Kemiskinan	40
4.4 Pengujian Statistik.....	40
4.4.1 Uji F (Simultan)	40

4.4.2 Uji t (Parsial)	40
4.4.3 Uji R ²	42
4.5 Interpretasi Estimasi Hasil Fixed Effect	42
4.6 Pembahasan.....	42
4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan	42
4.6.2 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan	43
4.6.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan	44
BAB V.....	46
SIMPULAN DAN IMPLIKASI	46
5.1 Kesimpulan	46
5.1 Implikasi.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pulau Jawa 2017-2019 (%)	3
Tabel 1. 2 Perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan Gini Rasio Jawa Timur 2023	5
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow.....	33
Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman	35
Tabel 4. 3 Hasil Fixed Effect.....	37
Tabel 4. 4 Analisis Statistik Deskriptif.....	38
Tabel 4. 5 Uji Parsial (Uji t)	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Dan Kontribusi Pdrb Menurut Wilayah	3
Gambar 1. 2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2017-2023	4
Gambar 1. 3 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur	11
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data Penelitian	50
Lampiran 2 Common Effect.....	60
Lampiran 3 Fixed Effect	61
Lampiran 4 Uji Chow	62
Lampiran 5 Random Effect	63
Lampiran 6 Uji Hausman	64

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN
PENDAPATAN, DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA
(TPAK) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

Yesinta Valentina

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

yesintav@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota periode 2015-2023. Variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan variabel independen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan regresi data panel yang diolah dengan Eviews 12 dengan metode common effect model, fixed effect model dan random effect model dengan melalui Uji Chow, Uji Hausman, Uji F dan Uji t. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa variabel ketimpangan pendapatan dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pada variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh distribusi pendapatan yang merata dan penurunan tingkat kemiskinan. Ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi salah satu isu utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan, terutama di wilayah dengan karakteristik pembangunan yang tidak merata. Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, variabel seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi faktor penting yang dikaji pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

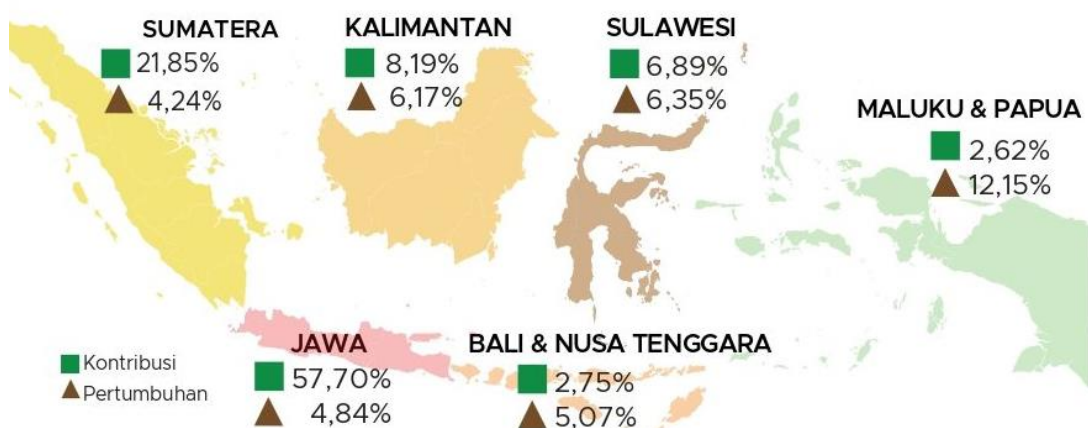
Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 41.814,5 ribu jiwa setelah Provinsi Jawa Barat sebesar 50.345,2 ribu jiwa (BPS, 2024). Namun, meskipun pertumbuhan ekonominya cukup stabil, kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di provinsi ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Timur mencapai 3.983 ribu jiwa pada tahun 2024 dan 4.189 ribu jiwa pada tahun 2023 yang merupakan kemiskinan tertinggi peringkat pertama dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi seperti di Kota Surabaya, Kota Madiun, dan Kota Malang (BPS, 2024).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara yang memungkinkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat maka akan berimbas kepada semua aspek yang ada di dalam Negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan

usaha negara jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan Nasional suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai peningkatan total *output* suatu perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang membuat *output* per kapita dan standar kehidupan terangkat. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya.

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Indonesia sebagai negara berkembang sejak tahun 1969 gencar melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan secara eksplisit bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu negara, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi berorientasi pada masalah pertumbuhan.

Pembangunan nasional merupakan proses pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial,



maupun politik. Pembangunan ekonomi, sebagai salah satu komponen penting, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan besar dalam proses pembangunan ini adalah ketimpangan distribusi hasil pembangunan antarwilayah. Ketimpangan terjadi ketika tidak semua wilayah memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, infrastruktur, dan kesempatan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di beberapa daerah (Todaro & Smith, 2006). Berikut Gambar berdasarkan pemetaan Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2024.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Dan Kontribusi Pdrb Menurut Wilayah
(Sumber : BPS 2024)

Dapat dilihat pada Gambar 1.1 menyatakan bahwa Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 57,70 persen dengan pertumbuhan 4,84 persen (y-on-y). Kemudian didukung data Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pulau Jawa tahun 2017-2019 sebagai berikut:

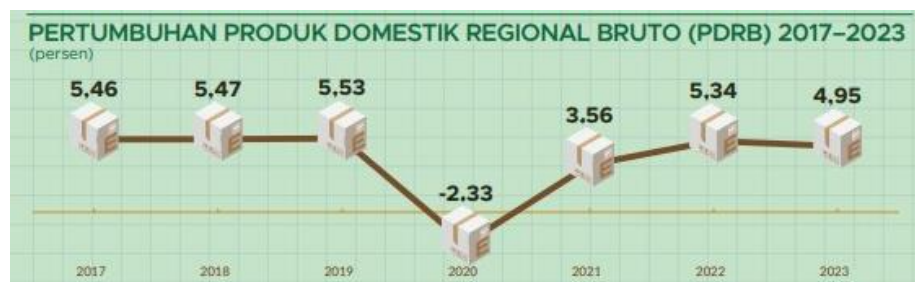
Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Pulau Jawa 2017-2019(%)

No	Provinsi	2017	2018	2019
1	DKI Jakarta	6,22	6,17	5,89
2	DIY	5,26	6,2	6,6
3	Jawa Timur	5,45	5,5	5,52

4	Jawa Barat	5,29	5,64	5,07
5	Banten	5,71	5,81	5,53
6	Jawa Tengah	5,27	5,32	5,41
7	Nasional	5,07	5,17	5,02

(Sumber: Dinas Dinamis Perekonomian Jawa Timur April 2018)

Dari Tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa Jawa Timur berkontribusi sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup signifikan. Kemudian didukung data pertumbuhan produk domestik regional bruto untuk mengukur pertumbuhan ekonomi nasional Jawa Timur dari tahun 2017-2023 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur 2017-2023

(Sumber : BPS, 2024)

Dapat dilihat pada Gambar 1.2 diketahui bahwa Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur menunjukkan fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tahun 2017, pertumbuhan PDRB tercatat sebesar 5,46%, yang sedikit meningkat menjadi 5,47% pada tahun 2018 dan terus naik hingga mencapai 5,53% pada 2019. Namun,

tahun 2020 mengalami penurunan drastis dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,33%, kemungkinan besar akibat dampak pandemi COVID-19. Perekonomian mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,56%, kemudian meningkat menjadi 5,34% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, pertumbuhan PDRB sedikit menurun menjadi 4,95%, tetapi masih mencerminkan pemulihan yang stabil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan pemulihan yang cukup baik, *indeks* ketimpangan (Gini Ratio) di Jawa Timur tetap menjadi perhatian, di mana ketimpangan pendapatan belum menunjukkan penurunan yang signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. 2 Perbandingan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan Gini Rasio Jawa Timur 2023

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	TPAK	Gini Rasio
	2023	2023
Kabupaten Pacitan	81.64	0.352
Kabupaten Ponorogo	75.88	0.341
Kabupaten Trenggalek	80.72	0.336
Kabupaten Tulungagung	74.7	0.328
Kabupaten Blitar	73.5	0.36
Kabupaten Kediri	68.74	0.306
Kabupaten Malang	70.66	0.378
Kabupaten Lumajang	68.49	0.391
Kabupaten Jember	72.3	0.344
Kabupaten Banyuwangi	79.04	0.351
Kabupaten Bondowoso	74.39	0.35
Kabupaten Situbondo	75.28	0.326
Kabupaten Probolinggo	69.48	0.319

Kabupaten Pasuruan	71.21	0.367
Kabupaten Sidoarjo	69.62	0.359
Kabupaten Mojokerto	72.51	0.338
Kabupaten Jombang	71.91	0.339
Kabupaten Nganjuk	66.89	0.324
Kabupaten Madiun	72.49	0.342
Kabupaten Magetan	78.48	0.373
Kabupaten Ngawi	69.43	0.328
Kabupaten Bojonegoro	74.29	0.283
Kabupaten Tuban	74.73	0.338
Kabupaten Lamongan	75.08	0.295
Kabupaten Gresik	70.12	0.33
Kabupaten Bangkalan	71.49	0.299
Kabupaten Sampang	73.54	0.254
Kabupaten Pamekasan	77.14	0.348
Kabupaten Sumenep	78.86	0.287
Kota Kediri	71.83	0.4
Kota Blitar	72.26	0.397
Kota Malang	67.58	0.413
Kota Probolinggo	70.61	0.347
Kota Pasuruan	75.65	0.378
Kota Mojokerto	72.5	0.353
Kota Madiun	69.29	0.416
Kota Surabaya	68.73	0.423
Kota Batu	78.99	0.33
Jawa Timur	72.56	0.387

(Sumber : BPS, 2024)

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 diketahui bahwa Pada tahun 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Jawa Timur menunjukkan variasi yang signifikan antar kabupaten/kota. Kabupaten Pacitan mencatat

TPAK tertinggi dengan 81,64%, diikuti oleh Kabupaten Trenggalek (80,72%) dan Kota Batu (78,99%). Di sisi lain, Kabupaten Nganjuk memiliki TPAK terendah sebesar 66,89%, diikuti oleh Kabupaten Lumajang (68,49%) dan Kota Malang (67,58%). Hal ini menunjukkan bahwa beberapa daerah memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi, terutama di wilayah pedesaan seperti Pacitan dan Trenggalek, dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Kota Malang yang lebih rendah.

Dari sisi Gini Ratio, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan, Kota Surabaya mencatat angka tertinggi sebesar 0,423, diikuti oleh Kota Madiun (0,416) dan Kota Malang (0,413), yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar di kota-kota besar. Sebaliknya, ketimpangan pendapatan terendah tercatat di Kabupaten Sampang dengan Gini Ratio 0,254, diikuti oleh Kabupaten Bojonegoro (0,283) dan Kabupaten Sumenep (0,287), yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di beberapa kabupaten pedesaan lebih merata dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun TPAK relatif tinggi di banyak daerah, ketimpangan pendapatan masih menjadi isu yang lebih signifikan di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan di Jawa Timur. Ketimpangan adalah ketidakmerataan kemampuan suatu wilayah atau daerah dalam menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk mendorong pembangunan wilayah atau daerah itu sendiri. Adanya ketidakmerataan itu disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah atau daerah.

Selain ketimpangan pendapatan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menjadi faktor penting dalam menganalisis pembangunan ekonomi. TPAK mencerminkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Partisipasi angkatan kerja yang tinggi menandakan bahwa banyak penduduk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Namun, di Jawa Timur, TPAK bervariasi antara daerah perkotaan dan

pedesaan. Pada tahun 2023, Kabupaten Pacitan mencatat TPAK tertinggi sebesar 81,64%, sedangkan Kota Malang mencatat TPAK yang lebih rendah sebesar 67,58%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa beberapa daerah pedesaan memiliki tingkat partisipasi tenaga kerja yang lebih tinggi, sementara daerah perkotaan menghadapi tantangan dalam mendorong lebih banyak penduduk untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari peran sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator yang menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. TPAK mencakup individu yang telah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, sehingga TPAK berperan penting dalam menentukan tingkat produktivitas suatu wilayah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Di Provinsi Jawa Timur, TPAK menunjukkan variasi yang signifikan antar wilayah, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam hal kesempatan kerja dan akses terhadap lapangan pekerjaan. Misalnya, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan memiliki TPAK tertinggi sebesar 81,64%, sementara Kabupaten Nganjuk memiliki TPAK terendah sebesar 66,89%. Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Pentingnya TPAK dalam memengaruhi tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan angkatan kerja yang lebih tinggi dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, wilayah dengan TPAK yang rendah cenderung mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi karena rendahnya kesempatan penduduk untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas ekonomi produktif.

Selain itu, TPAK juga berhubungan erat dengan ketimpangan. Wilayah dengan TPAK yang tinggi umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan ketimpangan. Namun, jika TPAK rendah, maka kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan menjadi terbatas. Oleh karena itu, TPAK menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Melalui penelitian ini, analisis terhadap TPAK diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran partisipasi angkatan kerja dalam memengaruhi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Jawa Timur. Pemahaman mengenai hubungan antara TPAK, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan akan menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

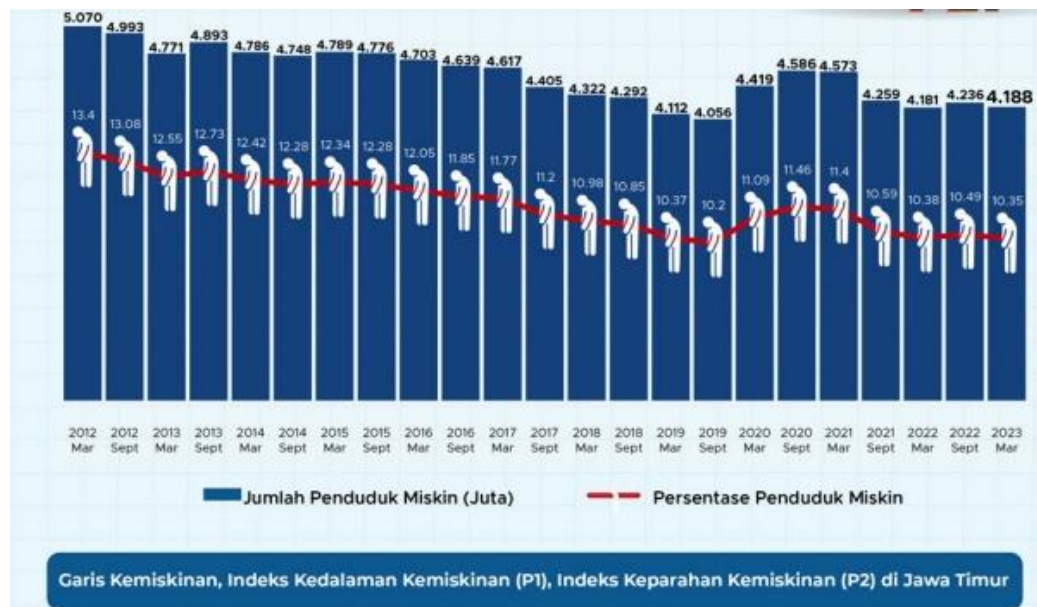
Dari data pendukung yang telah dijabarkan dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali dianggap sebagai solusi utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, sehingga diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan (Solow, 1956). Namun, teori *trickle-down effect* yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menurunkan tingkat kemiskinan telah dipertanyakan dalam banyak penelitian. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan, terutama jika distribusi pendapatan tidak merata dan ketimpangan tetap tinggi (Alesina & Rodrik, 1994). Kemiskinan merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan termasuk dalam kategori negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income*) tak luput dari masalah

kemiskinan. Program pembangunan ekonomi yang telah dicanangkan oleh pemerintah telah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pengentasan tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebab, tujuan dari program pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan diukur melalui indikator Gini Ratio, yang menunjukkan seberapa merata distribusi pendapatan di suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Timur, Gini Ratio menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kuznets (1955) dalam hipotesisnya menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, namun akan menurun ketika ekonomi mencapai tahap kematangan. Hal ini relevan dengan kondisi di Jawa Timur, di mana ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang yang mencatat Gini Ratio tinggi, yaitu di atas 0,4 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selain ketimpangan pembangunan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga merupakan faktor penting dalam memahami dinamika tingkat kemiskinan di suatu wilayah. TPAK mencerminkan seberapa banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, yang dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan (World Bank, 2006). Namun, di Jawa Timur, TPAK bervariasi antarwilayah, dengan beberapa daerah pedesaan memiliki partisipasi kerja yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi dan akses terhadap lapangan kerja (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kemiskinan sendiri dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Todaro dan Smith (2006)

menyatakan bahwa kemiskinan sering kali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Di Provinsi Jawa Timur, meskipun telah terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan masih menjadi masalah yang signifikan, terutama di wilayah pedesaan yang lebih terpencil. Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), tingkat kemiskinan di Jawa Timur masih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional, meskipun ada penurunan yang lambat. Berikut Gambar Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur dan Nasional.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur

(Sumber : BPS, 2024)

Berdasarkan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur dari tahun 2012 hingga 2023, seperti yang ditunjukkan dalam grafik, dapat disimpulkan bahwa upaya pengurangan tingkat kemiskinan telah berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Namun, grafik ini juga menegaskan pentingnya memperhatikan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor kunci dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ketimpangan dapat memperlambat penurunan tingkat kemiskinan karena perbedaan akses

terhadap fasilitas dan lapangan kerja antar wilayah. Meskipun jumlah penduduk miskin menurun, angka kemiskinan tetap signifikan, yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan secara keseluruhan (Alesina & Rodrik, 1994).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Kuznets (1955), ketimpangan yang ditunjukkan oleh perbedaan akses terhadap fasilitas dan lapangan kerja antar wilayah di Jawa Timur, serta pertumbuhan ekonomi yang belum merata, masih berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil mendorong penurunan tingkat kemiskinan mungkin lebih dirasakan di daerah perkotaan atau wilayah yang lebih berkembang, sementara daerah pedesaan atau daerah dengan infrastruktur terbatas masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif diperlukan, yaitu yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengatasi ketimpangan. Solow (1956) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai dengan distribusi modal dan sumber daya yang lebih merata. Peningkatan akses terhadap lapangan kerja di seluruh wilayah, serta distribusi pendapatan yang lebih merata, harus menjadi prioritas utama untuk mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja memengaruhi tingkat kemiskinan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif guna memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang inklusif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan penulis di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2023?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2023?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tersebut, maka terdapat tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat sebagai tambahan informasi bagi penulis mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Untuk menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu dalam satu tema penelitian. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa orang terlebih dahulu berikut dibawah ini:

Purnamasari (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2010-2014. Penelitian ini meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yaitu pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Nadhifah (2018) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan variabel dependennya yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Ashari & Athoillah (2023) melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Tapal Kuda. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Todaro dan Smith (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Di Provinsi Jawa Timur, tingkat kemiskinan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap infrastruktur dasar dan fasilitas ekonomi sering kali sangat terbatas.

Menurut Solow (1956), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu solusi utama untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Alesina dan Rodrik (1994), pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu berdampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan jika distribusi pendapatan tidak merata. Distribusi yang tidak merata akan menyebabkan kelompok masyarakat yang sudah sejahtera semakin kaya, sementara kelompok miskin tetap dalam kondisi yang sama.

Tingkat Kemiskinan di wilayah pedesaan Provinsi Jawa Timur juga disebabkan oleh rendahnya Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mencerminkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Rendahnya TPAK di beberapa wilayah pedesaan menunjukkan bahwa banyak penduduk yang tidak memiliki akses ke lapangan pekerjaan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif. Hal ini juga diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan di beberapa wilayah, yang membuat penduduk sulit untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja (Basri, 2020).

Dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, terdapat hubungan yang kompleks antara keduanya. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan memperburuk ketimpangan pendapatan, yang pada akhirnya memperburuk tingkat kemiskinan di wilayah yang tertinggal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Robert Chambers dalam Kadji (2013), faktor penyebab kemiskinan meliputi hilangnya hak atau kekayaan yang sulit untuk dipulihkan, yang mungkin disebabkan oleh kebutuhan mendesak atau krisis yang tiba-tiba. Kebutuhan tersebut sering kali berkaitan dengan kewajiban adat, musibah, ketidakmampuan fisik, pengeluaran tidak produktif, dan pemerasan. Beberapa teori kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Teori Marginalisasi

Teori ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh sifat-sifat seperti apatis, fatalisme, ketergantungan,

rendah diri, pemborosan, konsumtif, dan kurangnya jiwa kewirausahaan. Individu dengan karakteristik ini cenderung terpinggirkan dalam masyarakat, sehingga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan mereka (Usman dalam Kadji, 2013).

2. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan

Teori ini menggambarkan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari serangkaian faktor yang saling terkait dan membentuk siklus yang sulit diputus. Misalnya, rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan, yang berujung pada rendahnya investasi. Akibatnya, produktivitas tetap rendah, pendapatan tidak meningkat, dan siklus kemiskinan terus berlanjut (Nurkse dalam Kadji, 2013).

3. Teori Budaya Kemiskinan

Menurut teori ini, kemiskinan berkaitan dengan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang tidak mendukung kemajuan, seperti ketidakadilan dalam kepemilikan faktor produksi dan pendekatan pembangunan yang tidak tepat, dapat memperkuat kondisi kemiskinan (Soetrisno dalam Kadji, 2013).

4. Teori Ketergantungan

Teori ini menegaskan bahwa kemiskinan terjadi karena adanya ketergantungan pada pihak lain, baik secara ekonomi maupun sosial. Ketergantungan ini menghambat kemampuan individu atau kelompok untuk mandiri dan meningkatkan taraf hidup mereka (Usman dalam Kadji, 2013).

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan output ekonomi suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu (Case & Fair, 2007). Peningkatan PDRB menunjukkan bahwa suatu wilayah mampu meningkatkan produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pengurangan tingkat kemiskinan.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin pengurangan tingkat kemiskinan. Teori *trickle-down effect*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis menurunkan tingkat kemiskinan, telah dipertanyakan dalam berbagai penelitian (Alesina & Rodrik, 1994). Jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang merata, maka hasil dari pertumbuhan tersebut akan lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sudah lebih sejahtera, sedangkan kelompok miskin tidak akan merasakan manfaat langsung dari pertumbuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kasus di Provinsi Jawa Timur, di mana pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa wilayah tidak selalu berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah lainnya.

Solow (1956) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor industri di wilayah perkotaan, sedangkan daerah pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian cenderung tertinggal.

Ketidakseimbangan antara sektor industri dan pertanian inilah yang menjadi salah satu penyebab ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, **pertumbuhan ekonomi** yang tidak merata juga dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan memperburuk tingkat kemiskinan. Menurut World Bank (2006), pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang menciptakan lebih banyak kesempatan kerja di berbagai sektor dan wilayah, sangat penting untuk mendorong pengurangan tingkat kemiskinan. Jika pertumbuhan hanya terkonsentrasi pada beberapa sektor atau wilayah tertentu, maka efeknya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan akan sangat terbatas.

2.2.3 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah masalah umum di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketimpangan pendapatan merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap fasilitas ekonomi, dan infrastruktur antarwilayah (Todaro & Smith, 2006). Dalam konteks ekonomi, ketimpangan dapat dilihat dari perbedaan yang terjadi dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ketimpangan yang tinggi terjadi ketika sebagian besar hasil pembangunan terkonsentrasi pada kelompok masyarakat atau wilayah tertentu, sehingga menyebabkan sebagian lainnya tertinggal dalam hal kesejahteraan ekonomi (Alesina & Rodrik, 1994).

Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu penyebab utama ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi antarwilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antara lain perbedaan dalam distribusi sumber daya alam, tingkat pendidikan, akses terhadap

fasilitas kesehatan, dan kualitas infrastruktur (Kuncoro, 2013). Daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dan infrastruktur cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Pengukuran ketimpangan pendapatan sering dilakukan melalui indikator *Gini Ratio*, yang mencerminkan seberapa merata distribusi pendapatan di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), *Gini Ratio* di Provinsi Jawa Timur berada pada level yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antarwilayah masih sangat timpang. Ketimpangan ini tidak hanya menyebabkan perbedaan pendapatan tetapi juga memengaruhi kesempatan kerja, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di wilayah tertentu.

Solow (1956) dalam teorinya menekankan pentingnya distribusi modal dan sumber daya yang lebih merata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif. Distribusi yang tidak merata dapat memperlambat proses pembangunan di beberapa wilayah, terutama di daerah pedesaan yang sering kali memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dasar. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan stagnasi ekonomi di wilayah-wilayah yang tertinggal, memperburuk tingkat kemiskinan, dan memperluas kesenjangan antarwilayah.

Menurut Kuznets (1955), pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika ekonomi mencapai tahap kematangan, ketimpangan akan menurun. Teori ini relevan dengan kondisi di Provinsi Jawa Timur, di mana pertumbuhan ekonomi

yang pesat di beberapa wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang menciptakan ketimpangan yang signifikan dengan wilayah pedesaan yang tertinggal.

2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ekonomi yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK sangat penting dalam menganalisis kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah karena mencerminkan keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang produktif (Sukirno, 2013).

TPAK yang tinggi menunjukkan bahwa banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebaliknya, TPAK yang rendah sering kali menjadi indikator tingginya tingkat pengangguran dan ketidakmerataan akses terhadap lapangan pekerjaan. Di Provinsi Jawa Timur, TPAK bervariasi antarwilayah, dengan wilayah perkotaan seperti Surabaya dan Malang memiliki TPAK yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan seperti Pacitan dan Trenggalek (BPS, 2023).

Menurut Todaro dan Smith (2006), rendahnya TPAK sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang membuat penduduk tidak mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Selain itu, ketimpangan pembangunan juga berperan penting dalam mempengaruhi TPAK, di mana wilayah dengan akses yang lebih baik terhadap infrastruktur dan fasilitas ekonomi cenderung memiliki TPAK yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan TPAK dapat dicapai melalui perluasan

akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih merata di seluruh wilayah.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan yang tinggi mencerminkan peningkatan output total suatu negara atau daerah, yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana hasil pertumbuhan dapat didistribusikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, akan memberikan dampak signifikan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Todaro dan Smith (2014) menyatakan bahwa setinggi apapun pendapatan nasional per kapita dan pertumbuhan yang dicapai suatu negara selama distribusi pendapatan tidak berjalan merata maka tingkat kemiskinan akan tinggi. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka tingkat kemiskinan dapat tetap tinggi meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan.

2.3.2 Hubungan antara Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

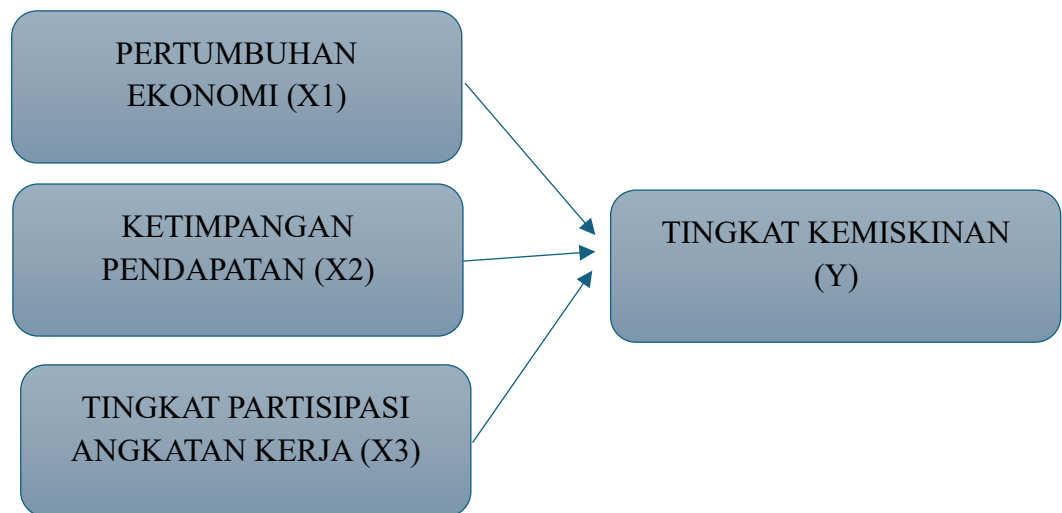
Menurut Todaro (2023), ketimpangan pendapatan merupakan kondisi perbedaan pendapatan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan pendapatan, risikonya orang kaya makin kaya dan orang miskin makin miskin. Hubungan antara ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan seringkali digambarkan melalui kurva Kuznets, di mana pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika perekonomian mencapai tahap

yang lebih matang. Ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperburuk kondisi tingkat kemiskinan karena kelompok masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan peluang peningkatan kesejahteraan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Purnamasari (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang tinggi mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, upaya mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti melalui kebijakan redistribusi, akses pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat berdampak positif dalam menekan angka kemiskinan.

2.3.3 Hubungan antara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Widyasworo (2014), tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. TPAK yang tinggi menunjukkan banyaknya individu usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik dalam bentuk pekerjaan formal maupun informal. Ketika tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat, terdapat potensi untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, dampaknya juga bergantung pada kualitas pekerjaan yang tersedia. Jika sebagian besar tenaga kerja hanya dapat mengakses pekerjaan dengan upah rendah atau dalam sektor informal, maka dampaknya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan akan terbatas. Oleh karena itu, upaya peningkatan TPAK perlu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan layak.

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin rendah Tingkat kemiskinan.
2. Diduga ketimpangan pendapatan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Artinya, semakin tinggi ketimpangan pembangunan, semakin tinggi pula Tingkat kemiskinan.
3. Diduga tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Timur. Artinya, semakin tinggi TPAK, semakin rendah tingkat kemiskinan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **kuantitatif** dengan pendekatan **penelitian kepustakaan** dan **analisis data panel**. Pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menemukan hubungan yang signifikan antara **pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** terhadap tingkat **kemiskinan** di Provinsi Jawa Timur. Penelitian kuantitatif ini memungkinkan pengujian hipotesis dengan menggunakan data numerik dan teknik statistik untuk melihat hubungan antarvariabel (Sugiyono, 2014).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kredibel, seperti **Badan Pusat Statistik (BPS)**, jurnal ilmiah, buku teori, dan artikel. Pengumpulan data sekunder ini berfungsi untuk mendukung analisis empiris dari data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian (Nazir, 2005).

3.2 Objek dan Subjek Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah **pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** terhadap **tingkat kemiskinan** di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan dilihat dari perbedaan distribusi pendapatan, akses terhadap fasilitas ekonomi, dan sumber daya di berbagai wilayah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diukur melalui **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**, yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah. TPAK diukur berdasarkan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja yang

dilaporkan oleh BPS. Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin yang dilaporkan oleh **BPS**.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini meliputi:

1. **Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur**, yang menyediakan data utama mengenai pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan.
2. **Ahli Ekonomi Pembangunan**, yaitu akademisi dan praktisi yang memiliki spesialisasi dalam bidang analisis statistik dan ekonomi pembangunan.
3. **Literatur Akademik**, yang digunakan untuk mendukung landasan teori dan penelitian empiris terkait ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah **pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja**. Ketimpangan pendapatan diukur menggunakan *Gini Ratio*, yang menunjukkan seberapa merata distribusi pendapatan di suatu wilayah. Semakin tinggi *Gini Ratio*, semakin besar ketimpangan pembangunan (Todaro & Smith, 2006). Pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan **PDRB**, yang merepresentasikan output ekonomi dan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun (Solow, 1956; Badan Pusat Statistik, 2023). Sedangkan, TPAK diukur menggunakan persentase jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja.

3.3.2 Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat **kemiskinan**, yang diukur berdasarkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Jawa Timur. Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Todaro & Smith, 2006).

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional ini memuat unsur-unsur penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan dibahas. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel berupa variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang ingin diteliti yaitu tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independennya yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, konsep dari masing-masing variabel penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat Kemiskinan (Y)

Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam penelitian ini, tingkat kemiskinan akan diukur berdasarkan indikator yang relevan, seperti persentase penduduk miskin di suatu wilayah. Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan memerlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pendapatan, dan partisipasi aktif angkatan kerja. Pemerintah juga berperan penting dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Tingkat kemiskinan pada penelitian ini diukur dalam satuan persen (%) yang datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2023.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kemajuan suatu wilayah. Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketimpangan sosial, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan di Provinsi Jawa Timur, juga perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tingginya tingkat pengangguran menjadi salah satu penyebab utama angka kriminalitas yang meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan stabilitas sosial. Pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini diukur dalam satuan persen (%) yang datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2023.

3. Ketimpangan Pendapatan (X2)

Ketimpangan pendapatan mengacu pada distribusi pendapatan yang tidak merata di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan akan dianalisis sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat akses kelompok berpenghasilan rendah terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerataan distribusi pendapatan menjadi salah satu upaya penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan pendapatan pada penelitian ini diukur dalam satuan koefisien gini yang datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2023.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia

kerja (15 tahun ke atas) yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. TPAK mencerminkan tingkat keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah dan menjadi salah satu tolok ukur produktivitas serta dinamika pasar tenaga kerja. Dalam penelitian ini, TPAK dianalisis untuk melihat kontribusinya terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada penelitian ini diukur dalam satuan persen (%) yang datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015-2023.

3.5 Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan **metode deskriptif** dan **kuantitatif**. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Data yang diperoleh dari BPS dianalisis secara deskriptif untuk melihat tren dan pola dalam variabel yang diamati.

Sementara itu, metode **kuantitatif** digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel dengan menggunakan teknik **regresi data panel**. Regresi ini digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi) terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan) (Gujarati & Porter, 2009). Model data panel dipilih karena penelitian ini melibatkan data lintas waktu dan lintas wilayah di Provinsi Jawa Timur. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap variasi data dalam beberapa tahun terakhir.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan **data sekunder**, yang diperoleh melalui metode berikut:

1. **Dokumentasi:** Data diambil dari laporan tahunan BPS, jurnal ilmiah, dan buku teori terkait ketimpangan pembangunan,

pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan. Dokumentasi ini digunakan sebagai sumber utama dalam mengumpulkan data kuantitatif yang relevan.

2. **Penelaahan Literatur:** Literatur yang relevan digunakan untuk memperkaya pemahaman tentang teori ekonomi pembangunan dan variabel-variabel yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan (Nazir, 2005).

3.7 Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode **deskriptif kuantitatif**. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan penjelasan terperinci untuk memudahkan interpretasi.

3.7.1 Regresi Data Panel

Regresi data panel digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat partisipasi aktif angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Model *Fixed Effect* dipilih berdasarkan hasil uji **Chow** dan **Hausman** yang dilakukan. Uji ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat untuk menganalisis hubungan antarvariabel dalam konteks wilayah dan waktu yang berbeda (Gujarati & Porter, 2009).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 TPAK + e$$

3.7.2 Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji asumsi klasik, dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah variabel bebas (pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi aktif tenaga kerja)

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (tingkat kemiskinan). Nilai koefisien regresi digunakan untuk menentukan besaran pengaruh variabel bebas terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan nilai **R-squared** dan **Adjusted R-squared** digunakan untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Pengujian dilakukan menggunakan data panel selama periode 2015 hingga 2023, dengan 38 cross-sections.

4.1 Pemilihan Model Regresi

Model yang digunakan adalah *Uji Chow* serta *Uji Hausman* untuk menentukan model yang paling tepat.

4.1.1 Uji Chow

Pemilihan model antara *common effect model* dan *fixed effect model* dapat dilakukan dengan *Uji Chow* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *common effect model*

H_a : *fixed effect model*

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	221.021277	(37,301)	0.0000
Cross-section Chi-square	1141.668655	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/16/24 Time: 22:39

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 342

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.19340	4.454965	4.532787	0.0000
X1	-0.102503	0.067537	-1.517728	0.1300
X2	-66.54036	6.083849	-10.93721	0.0000
X3	0.196110	0.054922	3.570698	0.0004
R-squared	0.304152	Mean dependent var		11.08775
Adjusted R-squared	0.297976	S.D. dependent var		4.581216
S.E. of regression	3.838459	Akaike info criterion		5.539646
Sum squared resid	4980.012	Schwarz criterion		5.584497
Log likelihood	-943.2794	Hannan-Quinn criter.		5.557513
F-statistic	49.24603	Durbin-Watson stat		0.319340
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil Uji Chow yang tercantum pada tabel di atas, nilai *Cross-section F* sebesar 221.021277 dan *Cross-section Chi-square* sebesar 1141.668655 dengan probabilitas 0.0000. Hal ini menunjukkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat digunakan daripada *Common Effect Model* dalam analisis ini. Nilai probabilitas yang sangat kecil ($p < 0.05$) berarti hipotesis nol (H_0), yang menyatakan bahwa *Common Effect Model* lebih baik, ditolak. Dengan demikian, uji ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar *cross-sections*, sehingga model *Fixed Effect* adalah model yang lebih sesuai untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat

partisipasi angkatan kerja dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode yang dianalisis.

4.1.2 Uji Hausman

Pemilihan model antara *fixed effect model* dan *random effect model* dapat dilakukan dengan Uji *Hausman* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *random effect model*

H_a : *fixed effect model*

Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	81.961378	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.009961	0.009736	0.000000	0.6087
X2	5.596279	3.825520	0.052110	0.0000
X3	-0.118087	-0.108568	0.000005	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/16/24 Time: 23:32

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 342

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.44931	1.335996	13.06090	0.0000
X1	0.009961	0.014078	0.707545	0.4798
X2	5.596279	1.926504	2.904888	0.0039
X3	-0.118087	0.017622	-6.701216	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975297	Mean dependent var	11.08775
Adjusted R-squared	0.972014	S.D. dependent var	4.581216
S.E. of regression	0.766387	Akaike info criterion	2.417808
Sum squared resid	176.7922	Schwarz criterion	2.877536
Log likelihood	-372.4451	Hannan-Quinn criter.	2.600951
F-statistic	297.0955	Durbin-Watson stat	1.049752
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil *Uji Hausman* pada tabel di atas, nilai *Chi-Sq. Statistic* sebesar 81.961378 dengan probabilitas 0.0000, menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model (FEM)* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *Random Effect Model (REM)*. Nilai probabilitas yang sangat kecil ($p < 0.05$) menyebabkan hipotesis nol

(H0) yang menyatakan bahwa *Random Effect* lebih baik ditolak. Oleh karena itu, variabel X1 (pertumbuhan ekonomi), X2 (ketimpangan pendapatan), dan X3 (tingkat partisipasi angkatan kerja) lebih baik dianalisis menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*. Pada hasil perbandingan, koefisien X1 dalam FEM lebih besar (0.009961) dibandingkan dengan REM (0.009736), koefisien X2 dalam FEM sebesar 5.596279 juga lebih besar dari REM (3.825520), dan seterusnya. Hal ini menegaskan bahwa FEM lebih mampu mengidentifikasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan lebih akurat dan signifikan.

4.2 Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* (FEM)

Tabel 4. 3 Hasil Fixed Effect

Dependent Variable: Y					
Method: Panel Least Squares					
Date: 11/16/24 Time: 22:37					
Sample: 2015 2023					
Periods included: 9					
Cross-sections included: 38					
Total panel (balanced) observations: 342					
Variable		Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C		17.44931	1.335996	13.06090	0.0000
X1		0.009961	0.014078	0.707545	0.4798
X2		5.596279	1.926504	2.904888	0.0039
X3		-0.118087	0.017622	-6.701216	0.0000
Effects Specification					
Cross-section fixed (dummy variables)					
R-squared	0.975297	Mean dependent var		11.08775	
Adjusted R-squared	0.972014	S.D. dependent var		4.581216	
S.E. of regression	0.766387	Akaike info criterion		2.417808	
Sum squared resid	176.7922	Schwarz criterion		2.877536	
Log likelihood	-372.4451	Hannan-Quinn criter.		2.600951	
F-statistic	297.0955	Durbin-Watson stat		1.049752	
Prob(F-statistic)	0.000000				

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* (FEM) di atas, variabel X1 (Pertumbuhan Ekonomi) memiliki koefisien 0.009961, namun dengan probabilitas 0.4798, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak signifikan pada tingkat 5%. Sementara itu, variabel X2 (Ketimpangan Pembangunan) memiliki koefisien 5.596279 dengan t-statistik 2.904888 dan probabilitas 0.0039, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti semakin besar ketimpangan pembangunan, semakin tinggi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Variabel X3 (TPAK) memiliki koefisien -0.118087 dengan t-statistik -6.701216 dan probabilitas 0.0000, yang menunjukkan bahwa TPAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti semakin besar TPAK, semakin rendah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Nilai R-squared sebesar 0.975297 mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 97.53% variasi dalam tingkat kemiskinan. Nilai *F-statistic* sebesar 297.0955 dengan probabilitas 0.0000 menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan, dengan asumsi bahwa variabel-variabel yang dimasukkan relevan dalam menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, TPAK dan tingkat kemiskinan.

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang variabel yang digunakan dalam penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui *mean*, *maximum*, *minimum*, *standar deviasi* dan besaran observasi penelitian. Berdasarkan hasil data olah didapat nilai statistik deskriptif variabel Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan Tingkat Kemiskinan sebagai berikut:

4.3 Analisis Deskriptif

Tabel 4. 4 Analisis Statistik Deskriptif

No.		Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan Pendapatan	TPAK	Tingkat Kemiskinan
1.	<i>Mean</i>	4.039678	0.337544	70.20898	11.08775
2.	<i>Maximum</i>	21.95000	0.420000	89.63000	25.69000
3.	<i>Minimum</i>	-6.460000	0.240000	60.56000	3.310000
4.	<i>Std. Dev</i>	3.123449	0.034554	3.805792	4.581216
5.	<i>Observation</i>	342	342	342	342

Sumber: Diolah dengan eviews 12

4.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2024 dengan jumlah 342 observasi diperoleh nilai rata-rata (*mean*) dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4.039678 dengan pertumbuhan ekonomi *maximum* sebesar 21.95 dan data pertumbuhan ekonomi *minimum* sebesar -6.46. Sementara itu untuk standar deviasi pada pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 3.123449.

4.3.2 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini, pengukuran ketimpangan pendapatan menggunakan tingkat *gini ratio*. Berdasarkan tabel 4.2 ketimpangan pendapatan tahun 2015-2023 dengan 342 observasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 0.337544 dengan ketimpangan pendapatan *maximum* sebesar 0.42 serta ketimpangan pendapatan *minimum* sebesar 0.24. Sementara itu standar deviasi pada ketimpangan pendapatan sebesar 0.034554.

4.3.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja merupakan variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini, pengukuran ketimpangan pendapatan menggunakan data persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Berdasarkan tabel 4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2015-2023 dengan 342 observasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 70.20898 dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *maximum* sebesar 89.63 serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja *minimum* sebesar 60.56. Sementara itu standar deviasi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 4.581216.

4.3.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan variabel *independen* yang digunakan pada penelitian ini, pengukuran tingkat kemiskinan menggunakan data persentase tingkat kemiskinan. Berdasarkan tabel 4.2. data tingkat kemiskinan tahun 2015-2023 dengan 342 observasi diperoleh nilai tingkat kemiskinan rata-rata (*mean*) sebesar 11.08775 dengan nilai tingkat kemiskinan *maximum* sebesar 25.69, serta angka *minimum* dari tingkat kemiskinan sebesar 3.31. Sementara standar deviasi pada tingkat kemiskinan adalah sebesar 4.581216.

4.4 Pengujian Statistik

4.4.1 Uji F (Simultan)

Uji F atau uji simultan digunakan untuk menentukan apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi, nilai F-statistik tercatat sebesar 297.0955 dengan probabilitas 0.000000, yang lebih kecil dari alpha 5%. Dengan demikian, H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)) secara simultan memengaruhi variabel dependen (tingkat kemiskinan).

4.4.2 Uji t (Parsial)

Tabel 4. 5 Uji Parsial (Uji t)

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Pertumbuhan ekonomi	0,009961	0,4798	Tidak signifikan
Ketimpangan pendapatan	5,596279	0,0039	Signifikan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	-0,118087	0,0000	Signifikan
---	-----------	--------	------------

Sumber: Eviews 12, diolah 2024

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut:

a. Variabel Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Diperoleh besarnya koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,009961 dengan nilai probabilitas sebesar 0,4789 yang artinya lebih besar dari alpha 5% (0,05), maka gagal menolak H_0 . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

b. Variabel Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Diperoleh besarnya koefisien ketimpangan pendapatan sebesar 5,596279 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0039 yang artinya lebih kecil dari alpha 5% (0,05), maka menolak H_0 . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

c. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan

Diperoleh besarnya koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,118087 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang artinya lebih kecil dari alpha 5% (0,05), maka menolak H_0 . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

4.4.3 Uji R²

Diperoleh nilai *R square* sebesar 0,975297 yang berarti bahwa variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 97,5297% sedangkan sisanya sebesar 2,4703% dijelaskan oleh variabel di luar model.

4.5 Interpretasi Estimasi Hasil Fixed Effect

Hasil persamaan *fixed effect model* dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = 17,44931 + 0,009961X_1 + 5,596279X_2 - 0,118087X_3$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan (%)

X₁ = Pertumbuhan Ekonomi (%)

X₂ = Ketimpangan Pendapatan (koefisien gini)

X₃ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil Uji Hausman dan pengujian model menggunakan *Fixed Effect Model (FEM)*, diperoleh hasil dalam pembahasan sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Dhia Nadhifah (2018), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan. Namun, hasil ini didukung oleh penelitian Widiastuti (2021), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung.

Ketimpangan distribusi pendapatan menjadi faktor utama dalam hubungan ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung hanya dinikmati oleh kelompok berpendapatan tinggi, sementara masyarakat miskin tidak memperoleh manfaat yang setara. Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan distribusi pendapatan justru memperbesar kesenjangan dan mempertahankan kemiskinan. Pertumbuhan yang tidak inklusif akan menciptakan kesenjangan yang semakin besar antara golongan kaya dan miskin, sehingga kemiskinan tetap menjadi masalah. Kebijakan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan tidak akan efektif dalam mengentaskan kemiskinan.

Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu berfokus pada pengurangan ketimpangan ekonomi, seperti redistribusi pendapatan, program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan langkah-langkah ini, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

4.6.2 Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan diduga mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Ketimpangan yang tinggi mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata, di mana sebagian besar kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, menyebabkan banyak masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Oktina Purnamasari (2017), yang menunjukkan bahwa

ketimpangan pendapatan secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di wilayah tertentu.

Meskipun pertumbuhan ekonomi terjadi, ketimpangan pendapatan tetap menjadi hambatan utama dalam penurunan tingkat kemiskinan. Kesenjangan ini sering kali disebabkan oleh akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat berpendapatan rendah cenderung tidak memiliki modal untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang fokus pada pengurangan ketimpangan, seperti peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, dan penciptaan peluang kerja yang lebih adil. Redistribusi melalui sistem pajak progresif juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan langkah-langkah tersebut, dampak ketimpangan terhadap kemiskinan dapat diminimalkan, sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan meningkat.

4.6.3 Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Tingkat Kemiskinan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Artinya, semakin tinggi partisipasi angkatan kerja, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini konsisten dengan temuan penelitian Ashari & Athoillah (2023), yang menyatakan bahwa peningkatan partisipasi tenaga kerja memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, pengaruh ini tidak selalu merata di seluruh kelompok masyarakat, terutama jika terjadi ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak.

Ketimpangan dalam kualitas pekerjaan menjadi faktor utama yang membatasi dampak positif TPAK terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun lebih banyak orang memasuki pasar kerja, jika sebagian besar dari mereka hanya dapat mengakses pekerjaan informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial, maka kemiskinan tetap sulit ditekan. Selain itu, kelompok dengan pendidikan rendah dan keterampilan terbatas sering kali menghadapi hambatan lebih besar dalam memperoleh pekerjaan yang layak dibandingkan mereka yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan.

Oleh karena itu, peningkatan TPAK perlu diimbangi dengan upaya mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan berkualitas. Kebijakan yang berfokus pada pemerataan kesempatan kerja, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan, penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan perlindungan sosial bagi pekerja berpenghasilan rendah, menjadi langkah penting dalam menekan ketimpangan dan kemiskinan secara bersamaan. Dengan strategi yang lebih inklusif, dampak positif peningkatan TPAK terhadap kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2023, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Variabel ketimpangan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Artinya, ketika ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan.
3. Variabel tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Artinya, ketika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami peningkatan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh implikasi sebagai berikut:

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Meskipun pertumbuhan ekonomi tidak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, pemerintah tetap harus memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Kebijakan

redistribusi pendapatan melalui pengembangan UMKM, penyediaan lapangan kerja produktif, serta peningkatan akses pendidikan bagi kelompok miskin diperlukan agar dampak pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

2. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang signifikan terhadap kemiskinan menunjukkan pentingnya kebijakan redistribusi yang lebih merata. Pemerintah dapat mengatasinya dengan sistem pajak progresif, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan pengembangan akses pendidikan untuk masyarakat miskin. Upaya ini akan membantu mengurangi kesenjangan pendapatan serta menekan angka kemiskinan.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pengaruh negatif TPAK terhadap kemiskinan menandakan bahwa peningkatan partisipasi kerja berdampak pada pengurangan kemiskinan. Pemerintah perlu meningkatkan akses ke pekerjaan formal yang layak, memberikan pelatihan keterampilan, dan mendorong usaha mandiri sehingga tenaga kerja menjadi lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alesina, A., & Rodrik, D. (1994). Distributive politics and economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2), 465-490.
- Ashari, T. R. & Athoillah, M. (2022). Analisis pengaruh Tingkat pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan Tapal Kuda. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(2), 313-326
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur*. Surabaya: Badan Pusat Statistik.
- Basri, M. H. (2020). *Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan tingkat pengangguran terhadap IPM*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Case, karl E. & Fair, Ray C. 2007. *Prinsip-Prinsip Ekonomi* Edisi 8 Deterjemahkan Oleh Y. Andri Zaimur. Jakarta: Erlangga
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Kadji, Y. (2013). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. Universitas Negeri Gorontalo.
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Nadhifah, D. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Naf'an, N. (2014). Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah.

- Nafziger, E. W. (2008). 26 Entrepreneurship and development. *International Handbook of Development Economics*, 1, 371.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Oktina, P. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2010-2014*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65-94.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga Cetakan Kelimabelas.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M.P. & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*. Twelfth Edition: New Jersey.
- Todaro, M. (2013). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*.
- Widiastuti, A. S. (2021). Pengaruh ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(1), 80-90.
- Widyasworo, R. (2014). *Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, dan Angkatan Kerja Wanita terhadap Kemiskinan di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Tahun 2008-2012)*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	Y (%)	X1 (%)	X2 (gini rasio)	X3 (%)
Kabupaten Pacitan	2015	16.68	5.10	0.33	80.64
Kabupaten Pacitan	2016	15.49	5.21	0.36	80.06
Kabupaten Pacitan	2017	15.42	4.98	0.32	79.48
Kabupaten Pacitan	2018	14.19	5.47	0.35	79.48
Kabupaten Pacitan	2019	13.67	5.08	0.40	79.62
Kabupaten Pacitan	2020	14.54	-1.84	0.35	80.36
Kabupaten Pacitan	2021	15.11	2.49	0.34	80.57
Kabupaten Pacitan	2022	13.8	5.54	0.34	82.99
Kabupaten Pacitan	2023	13.65	4.46	0.35	81.64
Kabupaten Ponorogo	2015	11.91	5.25	0.36	70.24
Kabupaten Ponorogo	2016	11.75	5.29	0.36	71.43
Kabupaten Ponorogo	2017	11.39	5.10	0.34	72.61
Kabupaten Ponorogo	2018	10.36	5.27	0.35	72.21
Kabupaten Ponorogo	2019	9.64	5.01	0.35	71.15
Kabupaten Ponorogo	2020	9.95	-0.9	0.38	71.51
Kabupaten Ponorogo	2021	10.26	3.19	0.37	72.63
Kabupaten Ponorogo	2022	9.32	3.24	0.34	72.92
Kabupaten Ponorogo	2023	9.53	5.14	0.34	75.88
Kabupaten Trenggalek	2015	13.39	5.03	0.37	74.43
Kabupaten Trenggalek	2016	13.24	5.00	0.39	72.85
Kabupaten Trenggalek	2017	12.96	5.02	0.35	71.27
Kabupaten Trenggalek	2018	12.02	5.03	0.39	75.38
Kabupaten Trenggalek	2019	10.98	5.08	0.37	73.45
Kabupaten Trenggalek	2020	11.62	-2.17	0.38	75.72
Kabupaten Trenggalek	2021	12.14	3.65	0.34	72.36
Kabupaten Trenggalek	2022	10.96	4.52	0.33	72.01
Kabupaten Trenggalek	2023	10.63	4.92	0.34	80.72
Kabupaten Tulungagung	2015	8.57	4.99	0.36	89.63

Kabupaten Tulungagung	2016	8.23	5.02	0.37	68.39
Kabupaten Tulungagung	2017	8.04	5.08	0.35	67.15
Kabupaten Tulungagung	2018	7.27	5.21	0.37	70.72
Kabupaten Tulungagung	2019	6.74	5.32	0.30	70.48
Kabupaten Tulungagung	2020	7.33	-3.09	0.34	73.17
Kabupaten Tulungagung	2021	7.51	3.53	0.33	72.26
Kabupaten Tulungagung	2022	6.71	5.22	0.34	71.95
Kabupaten Tulungagung	2023	6.53	4.91	0.33	74.7
Kabupaten Blitar	2015	9.97	5.06	0.33	67.57
Kabupaten Blitar	2016	9.88	5.08	0.34	69.31
Kabupaten Blitar	2017	9.80	5.07	0.37	71.05
Kabupaten Blitar	2018	9.72	5.10	0.38	70.61
Kabupaten Blitar	2019	8.94	5.12	0.33	72.93
Kabupaten Blitar	2020	9.33	-2.29	0.35	70.83
Kabupaten Blitar	2021	9.65	3.02	0.35	70.44
Kabupaten Blitar	2022	8.71	5.2	0.34	72.79
Kabupaten Blitar	2023	8.69	4.45	0.36	73.5
Kabupaten Kediri	2015	12.91	4.88	0.34	67.93
Kabupaten Kediri	2016	12.72	5.02	0.38	69.56
Kabupaten Kediri	2017	12.25	4.90	0.34	71.19
Kabupaten Kediri	2018	11.31	5.07	0.33	67.81
Kabupaten Kediri	2019	10.42	5.06	0.30	71.76
Kabupaten Kediri	2020	11.4	-2.41	0.33	70.65
Kabupaten Kediri	2021	11.64	3.06	0.33	69.34
Kabupaten Kediri	2022	10.65	4.9	0.33	68.73
Kabupaten Kediri	2023	10.72	4.53	0.31	68.74
Kabupaten Malang	2015	11.53	5.27	0.38	66.28
Kabupaten Malang	2016	11.49	5.30	0.32	66.28
Kabupaten Malang	2017	11.04	5.43	0.35	66.28
Kabupaten Malang	2018	10.37	5.55	0.38	69.85
Kabupaten Malang	2019	9.47	5.49	0.38	70.07
Kabupaten Malang	2020	10.15	-2.68	0.37	71.62
Kabupaten Malang	2021	10.5	3.12	0.37	68.49

Kabupaten Malang	2022	9.55	5.13	0.37	70.38
Kabupaten Malang	2023	9.45	5	0.38	70.66
Kabupaten Lumajang	2015	11.52	4.62	0.29	66.75
Kabupaten Lumajang	2016	11.22	4.70	0.35	65.27
Kabupaten Lumajang	2017	10.87	5.05	0.31	63.78
Kabupaten Lumajang	2018	9.98	5.00	0.32	68.25
Kabupaten Lumajang	2019	9.49	4.61	0.30	66.14
Kabupaten Lumajang	2020	9.83	-2.79	0.3	66.92
Kabupaten Lumajang	2021	10.05	3.14	0.31	66.19
Kabupaten Lumajang	2022	9.06	4.43	0.35	69.75
Kabupaten Lumajang	2023	8.93	5	0.39	68.49
Kabupaten Jember	2015	11.22	5.36	0.33	63.98
Kabupaten Jember	2016	10.97	5.23	0.31	66.33
Kabupaten Jember	2017	11.00	5.11	0.34	68.68
Kabupaten Jember	2018	9.98	5.02	0.34	68.14
Kabupaten Jember	2019	9.25	5.51	0.30	67.16
Kabupaten Jember	2020	10.09	-2.98	0.32	68.04
Kabupaten Jember	2021	10.41	4	0.34	68.97
Kabupaten Jember	2022	9.39	4.53	0.3	69.44
Kabupaten Jember	2023	9.51	4.93	0.34	72.3
Kabupaten Banyuwangi	2015	9.17	6.01	0.34	72.87
Kabupaten Banyuwangi	2016	8.79	5.38	0.33	72.87
Kabupaten Banyuwangi	2017	8.64	5.45	0.34	72.87
Kabupaten Banyuwangi	2018	7.80	5.84	0.31	72.21
Kabupaten Banyuwangi	2019	7.52	5.55	0.31	72.13
Kabupaten Banyuwangi	2020	8.06	-3.58	0.32	71.8
Kabupaten Banyuwangi	2021	8.07	4.09	0.37	72.32
Kabupaten Banyuwangi	2022	7.51	4.43	0.33	72
Kabupaten Banyuwangi	2023	7.34	5.03	0.35	79.04
Kabupaten Bondowoso	2015	14.96	4.95	0.32	71.33
Kabupaten Bondowoso	2016	15.00	4.97	0.35	72.32
Kabupaten Bondowoso	2017	14.54	5.03	0.32	73.3
Kabupaten Bondowoso	2018	14.39	5.08	0.35	71.63
Kabupaten Bondowoso	2019	13.33	5.30	0.30	76.01
Kabupaten Bondowoso	2020	14.17	-1.36	0.33	75.09
Kabupaten Bondowoso	2021	14.73	3.49	0.33	73.89
Kabupaten Bondowoso	2022	13.47	3.51	0.37	74.61
Kabupaten Bondowoso	2023	13.34	4.62	0.35	74.39

Kabupaten Situbondo	2015	13.63	4.86	0.33	68.9
Kabupaten Situbondo	2016	13.34	5.00	0.35	70
Kabupaten Situbondo	2017	13.05	5.07	0.33	71.1
Kabupaten Situbondo	2018	11.82	5.46	0.36	72.13
Kabupaten Situbondo	2019	11.20	5.44	0.32	72.4
Kabupaten Situbondo	2020	12.22	-2.33	0.31	73.17
Kabupaten Situbondo	2021	12.63	3.26	0.32	71.63
Kabupaten Situbondo	2022	11.78	4.39	0.3	72.15
Kabupaten Situbondo	2023	11.9	4.9	0.33	75.28
Kabupaten Probolinggo	2015	20.82	4.76	0.30	69.19
Kabupaten Probolinggo	2016	20.98	4.77	0.31	67.89
Kabupaten Probolinggo	2017	20.52	4.46	0.36	66.59
Kabupaten Probolinggo	2018	18.71	4.47	0.34	68.59
Kabupaten Probolinggo	2019	17.76	4.56	0.33	68.88
Kabupaten Probolinggo	2020	18.61	-2.12	0.33	72.89
Kabupaten Probolinggo	2021	18.91	3.35	0.33	73.24
Kabupaten Probolinggo	2022	17.12	4.52	0.28	71.56
Kabupaten Probolinggo	2023	17.19	4.73	0.33	69.48
Kabupaten Pasuruan	2015	10.72	5.38	0.32	67.7
Kabupaten Pasuruan	2016	10.57	5.44	0.32	67.16
Kabupaten Pasuruan	2017	10.34	5.72	0.34	66.61
Kabupaten Pasuruan	2018	9.45	5.73	0.32	69.77
Kabupaten Pasuruan	2019	8.68	5.83	0.31	68.82
Kabupaten Pasuruan	2020	9.26	-2.03	0.35	67.67
Kabupaten Pasuruan	2021	9.7	4.34	0.34	69.03
Kabupaten Pasuruan	2022	8.96	5.32	0.33	70.19
Kabupaten Pasuruan	2023	9.24	5.21	0.37	71.21
Kabupaten Sidoarjo	2015	6.44	5.24	0.35	67.49
Kabupaten Sidoarjo	2016	6.39	5.51	0.37	66.02
Kabupaten Sidoarjo	2017	6.23	5.80	0.34	64.54
Kabupaten Sidoarjo	2018	5.69	6.01	0.35	64.89
Kabupaten Sidoarjo	2019	5.32	5.99	0.31	66.98
Kabupaten Sidoarjo	2020	5.59	-3.69	0.34	67.17
Kabupaten Sidoarjo	2021	5.93	4.21	0.35	66.47
Kabupaten Sidoarjo	2022	5.36	7.53	0.37	72.87
Kabupaten Sidoarjo	2023	5	6.16	0.36	69.62
Kabupaten Mojokerto	2015	10.57	5.65	0.31	69.56
Kabupaten Mojokerto	2016	10.61	5.49	0.30	71.4

Kabupaten Mojokerto	2017	10.19	5.73	0.32	73.23
Kabupaten Mojokerto	2018	10.08	5.88	0.31	72.01
Kabupaten Mojokerto	2019	9.75	5.81	0.27	69.46
Kabupaten Mojokerto	2020	10.57	-1.11	0.33	69.79
Kabupaten Mojokerto	2021	10.62	4.12	0.29	70.47
Kabupaten Mojokerto	2022	9.71	5.82	0.33	71.34
Kabupaten Mojokerto	2023	9.8	5.15	0.34	72.51
Kabupaten Jombang	2015	10.79	5.36	0.32	68.79
Kabupaten Jombang	2016	10.70	5.40	0.34	69.09
Kabupaten Jombang	2017	10.48	5.36	0.34	69.39
Kabupaten Jombang	2018	9.56	5.29	0.32	70.11
Kabupaten Jombang	2019	9.22	5.10	0.33	71.04
Kabupaten Jombang	2020	9.94	-1.98	0.33	70.23
Kabupaten Jombang	2021	10	3.24	0.33	70.69
Kabupaten Jombang	2022	9.04	5.37	0.31	66.65
Kabupaten Jombang	2023	9.15	5.04	0.34	71.91
Kabupaten Nganjuk	2015	12.69	5.18	0.35	64.48
Kabupaten Nganjuk	2016	12.25	5.29	0.36	63.23
Kabupaten Nganjuk	2017	11.98	5.26	0.33	61.98
Kabupaten Nganjuk	2018	12.11	5.38	0.31	68.03
Kabupaten Nganjuk	2019	11.24	5.36	0.42	66.78
Kabupaten Nganjuk	2020	11.62	-1.71	0.34	65.75
Kabupaten Nganjuk	2021	11.85	3.61	0.31	64.24
Kabupaten Nganjuk	2022	10.7	4.84	0.3	66.79
Kabupaten Nganjuk	2023	10.89	5.4	0.32	66.89
Kabupaten Madiun	2015	12.54	5.26	0.32	66.12
Kabupaten Madiun	2016	12.69	5.27	0.34	65.49
Kabupaten Madiun	2017	12.28	5.42	0.32	64.85
Kabupaten Madiun	2018	11.42	5.10	0.33	69.58
Kabupaten Madiun	2019	10.54	5.42	0.33	70.47
Kabupaten Madiun	2020	11.46	-0.12	0.36	71.42
Kabupaten Madiun	2021	11.91	3.32	0.36	67.77
Kabupaten Madiun	2022	10.79	4.32	0.35	72.72
Kabupaten Madiun	2023	11.04	5.12	0.34	72.49
Kabupaten Magetan	2015	11.35	5.17	0.34	70.6
Kabupaten Magetan	2016	11.03	5.31	0.37	74.01
Kabupaten Magetan	2017	10.48	5.09	0.39	77.41
Kabupaten Magetan	2018	10.31	5.21	0.38	77.66

Kabupaten Magetan	2019	9.61	5.04	0.36	72.34
Kabupaten Magetan	2020	10.35	-1.64	0.32	73.23
Kabupaten Magetan	2021	10.66	3.04	0.36	73.31
Kabupaten Magetan	2022	9.84	3.89	0.35	74.03
Kabupaten Magetan	2023	9.8	4.47	0.37	78.48
Kabupaten Ngawi	2015	15.61	5.08	0.34	65.95
Kabupaten Ngawi	2016	15.27	5.21	0.34	66.05
Kabupaten Ngawi	2017	14.91	5.07	0.34	66.15
Kabupaten Ngawi	2018	14.83	5.21	0.35	75.51
Kabupaten Ngawi	2019	14.39	5.05	0.34	72.48
Kabupaten Ngawi	2020	15.44	-1.69	0.34	72.69
Kabupaten Ngawi	2021	15.57	2.55	0.31	72.88
Kabupaten Ngawi	2022	14.15	3.19	0.3	78.6
Kabupaten Ngawi	2023	14.4	4.49	0.33	69.43
Kabupaten Bojonegoro	2015	15.71	17.42	0.32	66.22
Kabupaten Bojonegoro	2016	14.60	21.95	0.32	68.37
Kabupaten Bojonegoro	2017	14.34	10.25	0.29	70.51
Kabupaten Bojonegoro	2018	13.16	4.39	0.35	67.36
Kabupaten Bojonegoro	2019	12.38	6.34	0.31	71.29
Kabupaten Bojonegoro	2020	12.87	-0.4	0.3	74.6
Kabupaten Bojonegoro	2021	13.27	-5.54	0.34	71.84
Kabupaten Bojonegoro	2022	12.21	-6.16	0.28	72.16
Kabupaten Bojonegoro	2023	12.18	2.47	0.28	74.29
Kabupaten Tuban	2015	17.08	4.89	0.29	67.18
Kabupaten Tuban	2016	17.14	4.90	0.33	69.45
Kabupaten Tuban	2017	16.87	4.98	0.31	71.71
Kabupaten Tuban	2018	15.31	5.15	0.36	71.87
Kabupaten Tuban	2019	14.58	5.14	0.30	68.76
Kabupaten Tuban	2020	15.91	-5.85	0.34	71.84
Kabupaten Tuban	2021	16.31	3	0.35	73.77
Kabupaten Tuban	2022	15.02	8.88	0.35	73.63
Kabupaten Tuban	2023	14.91	4.36	0.34	74.73
Kabupaten Lamongan	2015	15.38	5.77	0.30	68.63
Kabupaten Lamongan	2016	14.89	5.86	0.30	68.64
Kabupaten Lamongan	2017	14.42	5.50	0.32	68.65
Kabupaten Lamongan	2018	13.80	5.44	0.31	68.12
Kabupaten Lamongan	2019	13.21	5.43	0.32	68.96
Kabupaten Lamongan	2020	13.85	-2.65	0.3	70.81

Kabupaten Lamongan	2021	13.86	3.43	0.29	70.72
Kabupaten Lamongan	2022	12.53	5.56	0.27	69.3
Kabupaten Lamongan	2023	12.42	4.28	0.3	75.08
Kabupaten Gresik	2015	13.63	6.61	0.31	64.69
Kabupaten Gresik	2016	13.19	5.49	0.33	66.37
Kabupaten Gresik	2017	12.80	5.83	0.29	68.04
Kabupaten Gresik	2018	11.89	5.81	0.27	67.52
Kabupaten Gresik	2019	11.35	5.42	0.28	65.83
Kabupaten Gresik	2020	12.4	-3.68	0.3	66.53
Kabupaten Gresik	2021	12.42	3.79	0.31	69.43
Kabupaten Gresik	2022	11.06	7.38	0.36	68.3
Kabupaten Gresik	2023	10.96	4.62	0.33	70.12
Kabupaten Bangkalan	2015	22.57	-2.66	0.32	69.64
Kabupaten Bangkalan	2016	21.41	0.66	0.31	68.86
Kabupaten Bangkalan	2017	21.32	3.53	0.30	68.07
Kabupaten Bangkalan	2018	19.59	4.22	0.29	69.12
Kabupaten Bangkalan	2019	18.90	1.03	0.31	63.44
Kabupaten Bangkalan	2020	20.56	-5.59	0.32	67
Kabupaten Bangkalan	2021	21.57	-2.07	0.3	68.66
Kabupaten Bangkalan	2022	19.44	-1.12	0.31	73.86
Kabupaten Bangkalan	2023	19.35	1.2	0.3	71.49
Kabupaten Sampang	2015	25.69	2.08	0.30	68.37
Kabupaten Sampang	2016	24.11	6.17	0.31	68.71
Kabupaten Sampang	2017	23.56	4.69	0.29	69.04
Kabupaten Sampang	2018	21.21	4.11	0.26	67.55
Kabupaten Sampang	2019	20.71	1.85	0.27	66.74
Kabupaten Sampang	2020	22.78	-0.29	0.26	69.93
Kabupaten Sampang	2021	23.76	0.22	0.27	70.19
Kabupaten Sampang	2022	21.61	2.31	0.28	73.37
Kabupaten Sampang	2023	21.76	2.56	0.25	73.54
Kabupaten Pamekasan	2015	17.41	5.32	0.34	70.05
Kabupaten Pamekasan	2016	16.70	5.35	0.36	70.57
Kabupaten Pamekasan	2017	16.00	5.04	0.33	71.08
Kabupaten Pamekasan	2018	14.47	5.46	0.33	69.7
Kabupaten Pamekasan	2019	13.95	4.92	0.34	68.5
Kabupaten Pamekasan	2020	14.6	-2.54	0.32	69.82
Kabupaten Pamekasan	2021	15.3	3.41	0.32	65.88
Kabupaten Pamekasan	2022	13.93	4.66	0.31	73.59

Kabupaten Pamekasan	2023	13.85	4.96	0.35	77.14
Kabupaten Sumenep	2015	20.20	1.27	0.26	69.99
Kabupaten Sumenep	2016	20.09	2.58	0.31	71.6
Kabupaten Sumenep	2017	19.62	2.86	0.24	73.21
Kabupaten Sumenep	2018	20.16	3.63	0.25	71.84
Kabupaten Sumenep	2019	19.48	0.14	0.30	75.33
Kabupaten Sumenep	2020	20.18	-1.13	0.26	75.02
Kabupaten Sumenep	2021	20.51	2.61	0.29	75.63
Kabupaten Sumenep	2022	18.76	3.11	0.27	75.12
Kabupaten Sumenep	2023	18.7	5.35	0.29	78.86
Kota Kediri	2015	8.51	5.36	0.40	65.7
Kota Kediri	2016	8.40	5.54	0.39	65.5
Kota Kediri	2017	8.49	5.14	0.40	65.29
Kota Kediri	2018	7.68	5.43	0.33	65.47
Kota Kediri	2019	7.16	5.47	0.32	64.81
Kota Kediri	2020	7.69	-6.25	0.35	66
Kota Kediri	2021	7.75	2.5	0.37	67.35
Kota Kediri	2022	7.23	3.96	0.37	69.93
Kota Kediri	2023	7.15	1.92	0.4	71.83
Kota Blitar	2015	7.29	5.68	0.37	71.46
Kota Blitar	2016	7.18	5.76	0.41	71.68
Kota Blitar	2017	8.03	5.78	0.39	71.9
Kota Blitar	2018	7.44	5.82	0.35	72.38
Kota Blitar	2019	7.13	5.84	0.34	72.15
Kota Blitar	2020	7.78	-2.28	0.34	69.53
Kota Blitar	2021	7.89	4.28	0.37	69.96
Kota Blitar	2022	7.37	5.22	0.38	67.78
Kota Blitar	2023	7.3	5.29	0.4	72.26
Kota Malang	2015	4.60	5.61	0.38	60.56
Kota Malang	2016	4.33	5.61	0.41	62.67
Kota Malang	2017	4.17	5.69	0.42	64.77
Kota Malang	2018	4.10	5.72	0.41	66.25
Kota Malang	2019	4.07	5.73	0.34	66.1
Kota Malang	2020	4.44	-2.26	0.4	66.41
Kota Malang	2021	4.62	4.21	0.41	67.59
Kota Malang	2022	4.37	6.32	0.42	63.08
Kota Malang	2023	4.26	6.07	0.41	67.58
Kota Probolinggo	2015	8.17	5.86	0.36	63.61

Kota Probolinggo	2016	7.97	5.88	0.31	65.53
Kota Probolinggo	2017	7.84	5.88	0.37	67.45
Kota Probolinggo	2018	7.20	5.93	0.31	65.25
Kota Probolinggo	2019	6.91	5.94	0.27	64.12
Kota Probolinggo	2020	7.43	-3.64	0.31	69.07
Kota Probolinggo	2021	7.44	4.06	0.3	69.71
Kota Probolinggo	2022	6.65	6.12	0.32	68.39
Kota Probolinggo	2023	6.48	6.04	0.35	70.61
Kota Pasuruan	2015	7.47	5.53	0.39	67.24
Kota Pasuruan	2016	7.62	5.46	0.40	67.19
Kota Pasuruan	2017	7.53	5.47	0.38	67.14
Kota Pasuruan	2018	6.77	5.54	0.34	66.62
Kota Pasuruan	2019	6.46	5.56	0.31	68.12
Kota Pasuruan	2020	6.66	-4.33	0.3	70.05
Kota Pasuruan	2021	6.88	3.64	0.35	71.66
Kota Pasuruan	2022	6.37	6.22	0.36	68.05
Kota Pasuruan	2023	6.6	5.65	0.38	75.65
Kota Mojokerto	2015	6.16	5.74	0.36	69.87
Kota Mojokerto	2016	5.73	5.77	0.37	69.26
Kota Mojokerto	2017	5.73	5.65	0.39	68.65
Kota Mojokerto	2018	5.50	5.80	0.34	69.48
Kota Mojokerto	2019	5.15	5.65	0.31	65.09
Kota Mojokerto	2020	6.24	-3.69	0.36	68.21
Kota Mojokerto	2021	6.39	3.65	0.33	67.09
Kota Mojokerto	2022	5.98	5.56	0.38	69.41
Kota Mojokerto	2023	5.77	2.79	0.35	72.5
Kota Madiun	2015	4.89	6.15	0.38	65.97
Kota Madiun	2016	5.16	5.90	0.42	66.87
Kota Madiun	2017	4.94	5.93	0.36	67.76
Kota Madiun	2018	4.49	5.96	0.36	64.55
Kota Madiun	2019	4.35	5.69	0.35	66.86
Kota Madiun	2020	4.98	-5.34	0.39	68.63
Kota Madiun	2021	5.09	4.79	0.35	66.87
Kota Madiun	2022	4.76	5.52	0.4	68.85
Kota Madiun	2023	4.74	5.8	0.42	69.29
Kota Surabaya	2015	5.82	5.97	0.42	66.1
Kota Surabaya	2016	5.63	6.00	0.39	66.23
Kota Surabaya	2017	5.39	6.13	0.39	66.36

Kota Surabaya	2018	4.88	6.19	0.36	67.27
Kota Surabaya	2019	4.51	6.09	0.41	68.76
Kota Surabaya	2020	5.02	-4.85	0.34	68.05
Kota Surabaya	2021	5.23	4.29	0.35	67.3
Kota Surabaya	2022	4.72	6.51	0.39	69.99
Kota Surabaya	2023	4.65	5.7	0.42	68.73
Kota Batu	2015	4.71	6.69	0.36	68.6
Kota Batu	2016	4.48	6.61	0.34	70.98
Kota Batu	2017	4.31	6.56	0.30	73.35
Kota Batu	2018	3.89	6.50	0.33	70.66
Kota Batu	2019	3.81	6.51	0.32	71.22
Kota Batu	2020	3.89	-6.46	0.33	72.33
Kota Batu	2021	4.09	4.04	0.31	73.74
Kota Batu	2022	3.79	6.18	0.31	71.51
Kota Batu	2023	3.31	6.19	0.33	78.99

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan (%)

X1 = Pertumbuhan Ekonomi (%)

X2 = Ketimpangan Pendapatan (rasio gini)

X3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)

Lampiran 2 Common Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/16/24 Time: 22:38
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 342

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.19340	4.454965	4.532787	0.0000
X1	-0.102503	0.067537	-1.517728	0.1300
X2	-66.54036	6.083849	-10.93721	0.0000
X3	0.196110	0.054922	3.570698	0.0004
R-squared	0.304152	Mean dependent var		11.08775
Adjusted R-squared	0.297976	S.D. dependent var		4.581216
S.E. of regression	3.838459	Akaike info criterion		5.539646
Sum squared resid	4980.012	Schwarz criterion		5.584497
Log likelihood	-943.2794	Hannan-Quinn criter.		5.557513
F-statistic	49.24603	Durbin-Watson stat		0.319340
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3 Fixed Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/16/24 Time: 22:37
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 342

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.44931	1.335996	13.06090	0.0000
X1	0.009961	0.014078	0.707545	0.4798
X2	5.596279	1.926504	2.904888	0.0039
X3	-0.118087	0.017622	-6.701216	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975297	Mean dependent var	11.08775
Adjusted R-squared	0.972014	S.D. dependent var	4.581216
S.E. of regression	0.766387	Akaike info criterion	2.417808
Sum squared resid	176.7922	Schwarz criterion	2.877536
Log likelihood	-372.4451	Hannan-Quinn criter.	2.600951
F-statistic	297.0955	Durbin-Watson stat	1.049752
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	221.021277	(37,301)	0.0000
Cross-section Chi-square	1141.668655	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/16/24 Time: 22:39

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 342

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.19340	4.454965	4.532787	0.0000
X1	-0.102503	0.067537	-1.517728	0.1300
X2	-66.54036	6.083849	-10.93721	0.0000
X3	0.196110	0.054922	3.570698	0.0004
R-squared	0.304152	Mean dependent var		11.08775
Adjusted R-squared	0.297976	S.D. dependent var		4.581216
S.E. of regression	3.838459	Akaike info criterion		5.539646
Sum squared resid	4980.012	Schwarz criterion		5.584497
Log likelihood	-943.2794	Hannan-Quinn criter.		5.557513
F-statistic	49.24603	Durbin-Watson stat		0.319340
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5 Random Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/16/24 Time: 23:19
 Sample: 2015 2023
 Periods included: 9
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 342
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.37958	1.398048	12.43132	0.0000
X1	0.009736	0.014071	0.691865	0.4895
X2	3.825520	1.912932	1.999820	0.0463
X3	-0.108568	0.017494	-6.206159	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.686407	0.9247
Idiosyncratic random			0.766387	0.0753
Weighted Statistics				
R-squared	0.093930	Mean dependent var		1.049648
Adjusted R-squared	0.085888	S.D. dependent var		0.890304
S.E. of regression	0.851212	Sum squared resid		244.9021
F-statistic	11.67981	Durbin-Watson stat		0.734144
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.076909	Mean dependent var		11.08775
Sum squared resid	7707.171	Durbin-Watson stat		0.023328

Lampiran 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	81.961378	3	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.009961	0.009736	0.000000	0.6087
X2	5.596279	3.825520	0.052110	0.0000
X3	-0.118087	-0.108568	0.000005	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 11/16/24 Time: 23:32

Sample: 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 342

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.44931	1.335996	13.06090	0.0000
X1	0.009961	0.014078	0.707545	0.4798
X2	5.596279	1.926504	2.904888	0.0039
X3	-0.118087	0.017622	-6.701216	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.975297	Mean dependent var	11.08775
Adjusted R-squared	0.972014	S.D. dependent var	4.581216
S.E. of regression	0.766387	Akaike info criterion	2.417808
Sum squared resid	176.7922	Schwarz criterion	2.877536
Log likelihood	-372.4451	Hannan-Quinn criter.	2.600951
F-statistic	297.0955	Durbin-Watson stat	1.049752
Prob(F-statistic)	0.000000		